



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2021





PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Kab. Karimun, Jl. Jend.Sudirman Gedung Bukit Salembak Lt.2
Telp. 07777 – 366055 Tanjung Balai Karimun, Kode Pos 29631
Email : bkbdppa@yahoo.com, facebook Bkbd Ppa Karimun

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 15.C TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana seluruh sasaran strategis, program dan kegiatan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan;
- b. bahwa sebagai rencana tahunan OPD, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Karimun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun tentang Penunjukan/Penetapan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun 2006-2025;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 5);
- 17 Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38);
- 18 Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022 bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Barang/Jasa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun serta mempedomani aturan yang berlaku.
- KETIGA : Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2021.
- KEEMPAT : Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan OPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan Renstra.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun pada Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN



Dra. ROSMAWATI, MM.Pub
NIP. 19650814 199403 2 014

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 15.C TAHUN 2021
TANGGAL 11 JANUARI 2021

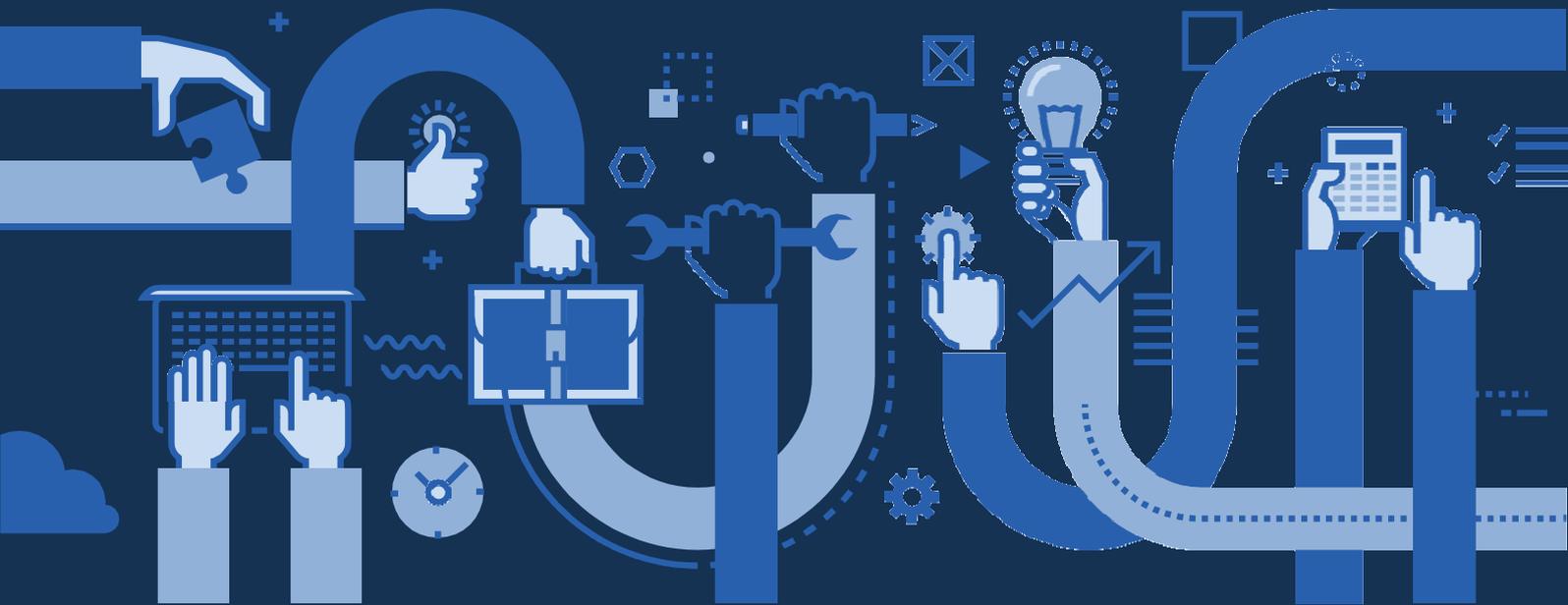
PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/ GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dra. Rosmawati, MM.Pub NIP. 19650814 199403 2 014 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas DPPKBP3A Kabupaten Karimun	Pengarah
2	drh. Yoeyoen Marrahayoeni, M.H NIP. 19690326 199503 2 001 Pembina Tingkat I, IV/b	Sekretaris DPPKBP3A Kabupaten Karimun	Penanggung Jawab
3	Abrita Zulkarnaen, SKM NIP. 19690517 199003 1 012 Penata Tingkat I, III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DPPKBP3A	Ketua
4	Eko Putra Handoyo Honorir	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DPPKBP3A	Anggota
5	Pandu Adyaksa Putra Honorir	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DPPKBP3A	Anggota

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN



Dra. ROSMAWATI, MM.Pub
NIP. 19650814 199403 2 014



**RENJA DPPKBP3A
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat -Nya dan kesediaan para pengelola data perencanaan dan informasi pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Karimun, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku “Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022”.

Sebagaimana Rencana Kerja tahun-tahun yang lalu, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 ini juga masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu walaupun rencana yang disusun dalam buku ini belum seluruhnya memenuhi keinginan atau kebutuhan sebagaimana yang diharapkan, namun dapat menjadi panduan dan pedoman kerja serta bermanfaat khususnya bagi para pengelola dan pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun, mitra terkait dan siapa saja yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap program-program OPD DPPKBP3A termasuk masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan swasta dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Karimun.

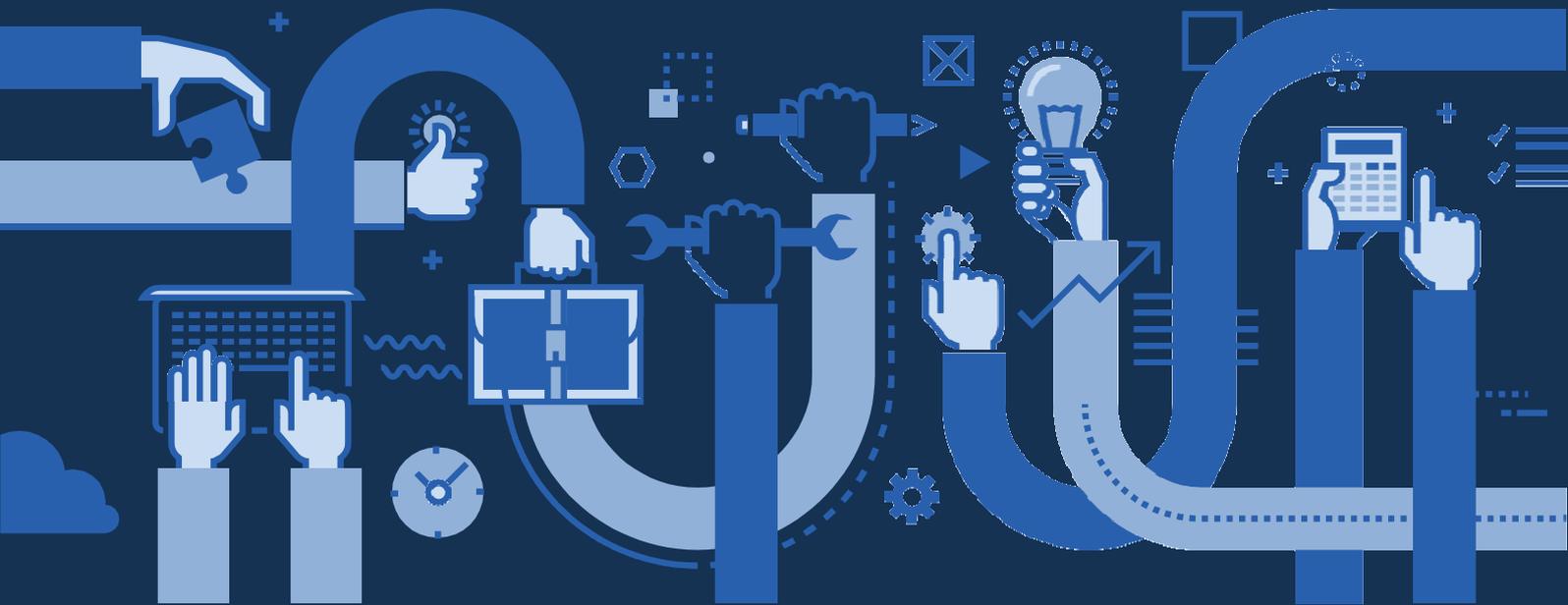
Akhirnya, terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sejak awal proses penyusunan Buku Rencana Kerja (Renja) OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 ini hingga selesai.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2021
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN



Dra. ROSMAWATI, MM.Pub.
NIP. 19650814 199403 2 014

RENJA DPPKBP3A TAHUN 2022



**RENJA DPPKBP3A
TAHUN 2022**

BAB : I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Karimun Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Renja Tahun 2022 OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan RPJMD Kabupaten Karimun yang menjadi acuan pada Rencana Strategis (Renstra) OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun.

Renja OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan.

Sejak dibentuknya Kabupaten Karimun pada tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Karimun dengan segala potensi dan kemandirian yang dimiliki berupaya terus untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor, diantaranya pembangunan di sektor Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan upaya di sektor tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pokok diantaranya penyusunan perencanaan kinerja, dimana seluruh sasaran strategis, program dan kegiatan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan (Rencana Kerja Tahunan). Di dalam Rencana Kerja (Renja) dijabarkan dan ditetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi OPD Dinas PPKBPPPA untuk mencapainya dalam satu periode tahunan dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dalam tahap awal penyusunan perencanaan tersebut harus dilandasi dengan keakuratan data dan informasi.



Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi dan program OPD yang ditetapkan dalam Renstra OPD sesuai arahan operasional dalam Renja OPD.
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja dan RKA tahun 2022.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Renja tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD pada tahun 2022 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD dan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026.

Dalam penyusunan rencana kerja tahunan OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun Tahun 2022 selain dimulai dari persiapan data pendukung perencanaan juga menampung dan mengakomodir segala keinginan, inspirasi, dan kebutuhan dari setiap bidang yang ada di lingkungan OPD, serta tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan melibatkan berbagai bidang dan program serta sektor terkait.

Dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrument pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar dalam mencapai “TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun Tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.

- 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 5);
 17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38);
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);
 19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
 20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
 21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 75);
 22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 37).

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. U m u m

Memberi gambaran secara rinci Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022.

2. K h u s u s

- a. Menjelaskan gambaran latar belakang penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun.
- b. Memahami visi, misi, kebijakan dan strategi pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun.

RENJA DPPKBP3A TAHUN 2022

- 
- c. Mengetahui program-program yang menjadi Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022.
 - d. Diketuainya kegiatan-kegiatan yang menjadi Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Menyajikan secara ringkas tentang latar belakang, landasan Hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan serta susunan garis besar isi Dokumen Renja OPD Tahun 2022.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

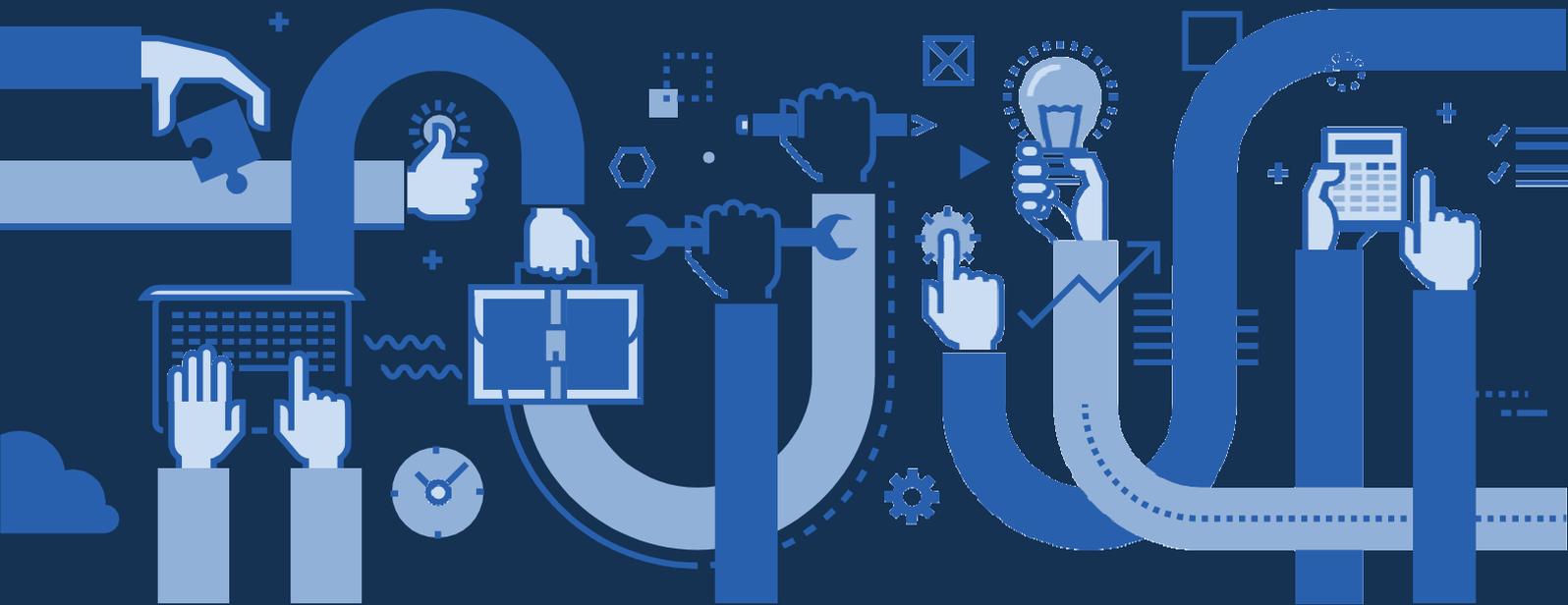
Menyajikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan yang direncanakan oleh OPD pada tahun 2022.

BAB IV. Penutup

Berisikan tentang catatan-catatan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



**RENJA DPPKBP3A
TAHUN 2022**

BAB : II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Hasil dari Evaluasi Rencana Kerja (Renja) OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun Tahun 2020 adalah gabungan dari hasil evaluasi semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada DPPKBP3A Kabupaten Karimun selama tahun 2020.

Rencana kerja tahun 2020 tingkat pencapaian program disesuaikan dengan peluang dan kekuatan, sehingga target yang disusun atau yang ingin dicapai tidak mayoritas 100%. Secara umum dari 15 Program dan 35 kegiatan belanja langsung yang dilaksanakan hingga tanggal 31 Desember 2020 tingkat pencapaiannya bila diukur dari realisasi keuangan sebesar 44,48% serta realisasi fisik selesai sebesar 98,26%. ada 10 (Sepuluh) program realisasi keuangan di atas 75% hingga 100%, sedangkan 5 (Lima) program realisasi keuangan di bawah 75%, sedangkan 3 (Tiga) program didrop pada APBD-P 2020. Program-program kegiatan OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan.
2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
4. Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
5. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV-AIDS bagi Perempuan dan Anak.
6. Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
11. Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
12. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

13. Program Dukungan Sarana Pelayanan KB.
14. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Analisis terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD Dinas PPKBPPPA Kabupaten Karimun selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu anggaran program ini pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran pada APBD Murni sebesar Rp.553.425.000,- menjadi Rp.643.612.500 pada APBD Perubahan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.635.870.000,- dan persentase keuangan sebesar 98,80%, sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 97,38%. Indikator kinerjanya adalah tercapainya pelayanan administrasi umum perkantoran di OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 29.999.960,- realisasi anggaran sebesar Rp.29.753.000,- dan persentase keuangan sebesar 99,18%. Indikator kinerjanya adalah tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang valid dan terpercaya. Kegiatan pada program ini adalah : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

3. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pagu anggaran program ini pada APBD Murni Rp.2.215.483.900,- menjadi Rp.2.090.984.000,- pada APBD Perubahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.485.611.500,- dan persentase keuangan sebesar 23,22%. Indikator kinerjanya adalah meningkatnya cakupan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Karimun. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- 3.1. Operasional Penggerakan Di Kampung KB (DAK Non Fisik).
- 3.2. Operasional Pembinaan Program Oleh Kader (DAK Non Fisik).
- 3.3. Operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan (DAK Non Fisik).
- 3.4. Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik).
- 3.5. Manajemen Pengelolaan BOKB (DAK Non Fisik).
- 3.6. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Keluarga Berencana (KB) Kesehatan.
- 3.7. Sosialisasi dan Edukasi Program KKBPK

4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Pagu anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.324.999.400,- berkurang pada APBD Perubahan menjadi Rp.78.999.700,- realisasi anggaran sebesar Rp.76.377.000,- dan persentase keuangan sebesar 96.68%. Indikator kinerjanya adalah meningkatnya Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan di Kabupaten Karimun. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- 4.1. Koordinasi Pengembangan dan perlindungan Anak.
- 4.2. Pembinaan Forum Anak Kabupaten Karimun.
- 4.3. Pengembangan Kota Layak Anak.
- 4.4. Fasilitasi Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kota Layak Anak.

5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Pagu anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.75.000.000,- berubah pada APBD-P sebesar Rp.50.000.000,- dengan kegiatan utama Pemilihan PIK-R dan Duta Genre Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Provinsi dan target sasaran kegiatan sebanyak 100 orang remaja. dan persentase keuangan sebesar 92.53%, Indikator kinerjanya adalah meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) di wilayah Kabupaten Karimun.

6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pagu anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.504.999.960,- menjadi Rp.304.999.200,- pada APBD-P dengan realisasi anggaran sebesar Rp.270.535.500,- dan persentase keuangan sebesar 88.70%. Indikator kinerjanya adalah meningkatnya kinerja kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak di Kabupaten Karimun. Kegiatan pada program ini antara lain :

- 6.1. Administrasi Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- 6.2. Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian APE (Anugerah Parahita Ekapraya).
- 6.3. Koordinasi dan Singkronisasi Pokja PUG dan focal Point PUG.
- 6.4. Hari Anak Nasional.

7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pagu anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.274.999.760,- berubah pada APBD-P menjadi Rp.89.999.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.88.582.800,- dan persentase keuangan sebesar 98.43%. Indikator kinerjanya adalah meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Kabupaten Karimun. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- 7.1. Penyelenggaraan Hari Ibu Kabupaten Karimun.
- 7.2. Penyuluhan tentang Pola Hidup Sehat Bagi Perempuan.
- 7.3. Perlindungan Perempuan Terhadap Penyakit Kanker

8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Pagu anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.375.000.000,- pada APBD-P menjadi Rp.198.033.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.183.874.500,- dan persentase keuangan sebesar 92.85%. Indikator kinerjanya adalah meningkatnya peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan di Kabupaten Karimun. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- 8.1. Penyelenggaraan Hari Kartini Kabupaten karimun.
- 8.2. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan.
- 8.3. Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi.
- 8.4. Pengelolaan dan Analisa Data Terpilah Gender Kabupaten Karimun.

9. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS Bagi Perempuan dan Anak

Pagu anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.199.999.860,- menjadi Rp.22.999.860,- pada APBD-P dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.377.500,- dan persentase keuangan sebesar 92.95%. Indikator kinerjanya adalah meningkatnya upaya penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS bagi perempuan dan anak di masyarakat. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- 9.1. Peningkatan Perlindungan Perempuan Terhadap Bahaya Narkoba, PMS, HIV/.
- 9.2. Peningkatan Perlindungan Anak dan Remaja Terhadap Bahaya Narkoba, PMS, HIV/AIDS.

10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pagu anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.74.999.640,- menurun pada APBD-P menjadi Rp.64.999.640,- serta realisasi anggaran sebesar Rp.64.405.100,- dan persentase keuangan sebesar 99.09%. Indikator kinerjanya adalah tersedianya dokumen perencanaan dan kinerja OPD yang valid, releabel dan akuntabel. Kegiatan pada program ini sebagai berikut :

- 10.1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA).
- 10.2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD.

11. Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pagu anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.74.999.700,- namun pada APBD-P program ini didrop atau dibatalkan dengan pagu Rp.0,-. Indikator kinerjanya adalah meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di masyarakat. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- 11.1. Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS.

12. Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Pagu anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.175.000.000,- dan menurun pada APBD-P sebesar Rp.60.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.59.734.500,- dan persentase keuangan sebesar 99.56%. Indikator kinerjanya adalah terwujudnya upaya Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Karimun. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- 12.1. Peningkatan Kesertaan KB.

13. Program Dukungan Sarana Pelayanan KB

Pagu anggaran program ini sebesar Rp.1.015.920.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.106.354.400,- dan persentase keuangan sebesar 10.47%, sebab semua kegiatan DAK Fisik KB tersebut tidak bisa dilaksanakan seluruhnya. Indikator kinerjanya adalah meningkatnya kinerja pelayanan KB di masyarakat. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

- 13.1. Pengadaan Sarana Pelayanan KB.
- 13.2. Pendamping Administrasi.



14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.75.000.000,- namun pada APBD-P program ini didrop atau dibatalkan dengan pagu Rp.0,-. Indikator kinerjanya adalah meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

14.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

15. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pagu anggaran program ini pada APBD Murni sebesar Rp.50.000.000,- namun pada APBD-P program ini didrop atau dibatalkan dengan pagu Rp.0,-. Indikator kinerjanya adalah meningkatnya disiplin Aparatur OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

15.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Tabel 2.1.
EVALUASI REALISASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog/Keg (Renstra 2016 s/d 2021)	Indikator Kinerja Prog (Outcome) /Keg (Output) (Renstra 2016 s/d 2021)	Target Renstra Perangkat Daerah (PD) pada Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang di evaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun Anggaran 2020								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di evaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Thn 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d 2020 (Akhir Thn Pelaksanaan Renja PD Thn 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9+10+11+12				13= 13/8x 100%		14 = 7 + 13		15=15/6 x100%						
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																									
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																									
1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Ditindaklanjuti (%)	100	2.200.000.000	550	1.295.117.300	225	274.999.960	0	0	60	67.859.500	0	18.600.000	0	2.123.300	60	88.582.800	32,2	88.582.800	610	1.383.700.100	62,90	1.383.700.100
		Penyelenggaraan Hari Ibu Kabupaten Karimun	Jumlah peserta	600	600.000.000	150	170.281.000	75	74.999.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	170.281.000	28,38	170.281.000
		Penyuluhan tentang Pola Hidup Sehat Bagi Perempuan	Jlh Perempuan Peserta Penyuluhan	800	800.000.000	200	381.213.000	75	100.000.000	0	0	30	36.527.000	0	18.600.000	0	2.123.300	30	57.250.300	57,3	57.250.300	230	438.463.300	54,81	438.463.300
		Perlindungan Perempuan Terhadap Penyakit Kanker	Jlh Perempuan Peserta Penyuluhan	800	800.000.000	200	743.623.300	75	100.000.000	0	0	30	31.332.500	0	0	0	0	30	31.332.500	31,3	31.332.500	230	774.955.800	96,87	74.955.800
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	45,4	2.304.000.000	725	2.202.430.750	265	375.000.000	0	0	40	37.036.500	0	0	90	146.838.000	130	183.874.500	49,0	183.874.500	855	2.183.145.850	94,75	2.183.145.850
		Penyelenggaraan Hari Kartini Kabupaten Karimun	Jlh Peserta Kegiatan	500	604.000.000	220	528.954.000	100	50.000.000	0	0	10	4.663.000	0	0	0	0	10	4.663.000	9,33	4.663.000	230	533.617.000	88,35	533.617.000
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jlh Orang Yang Difasilitasi	600	600.000.000	250	839.236.300	75	100.000.000	0	0	30	32.373.500	0	0	0	0	30	32.373.500	32,37	32.373.500	280	871.609.800	145,27	871.609.800
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Jlh Peserta Kegiatan	300	500.000.000	175	670.938.450	45	150.000.000	0	0	0	0	0	0	45	106.980.600	45	106.980.600	71,32	106.980.600	220	777.919.050	155,58	777.919.050
		Pengelolaan dan Analisa Data Terpilah Gender Kabupaten Karimun	Jumlah OPD/Instansi dikoordinir	135	600.000.000	80	163.302.000	45	75.000.000	0	0	0	0	0	0	45	39.857.400	45	39.857.400	53,14	39.857.400	125	203.159.400	33,86	203.159.400

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	92,8	2.200.000.000	284	1.364.643.400	196	504.999.960	0	0	6	38.888.100	3	21.750.000	87	209.897.400	96	270.535.500	53,6	270.535.500	380	1.635.178.900	74,33	1.635.178.900
Administrasi Umum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jlh bulan operasional/ Kegiatan	60	600.000.000	36	318.832.500	12	99.999.960	0	0	6	18.978.100	3	21.750.000	3	58.087.800	12	98.815.900	98,82	98.815.900	48	417.648.400	69,61	417.648.400
Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Jumlah OPD/ Instansi dikoordinir	135	425.000.000	45	224.557.400	45	125.000.000	0	0	0	8.802.500	0	0	45	88.794.600	45	97.597.100	78,08	97.597.100	90	322.154.500	75,80	322.154.500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pokja PUG dan focal Point PUG	Jlh OPD/ Kecamatan Peserta Koordinasi	180	275.000.000	78	423.577.500	39	130.000.000	0	0	0	11.107.500	0	0	39	63.015.000	39	74.122.500	57,02	74.122.500	117	497.700.000	180,98	497.700.000
Hari Anak Nasional	Jlh Peserta Kegiatan	280	900.000.000	125	397.676.000	100	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	397.676.000	44,19	397.676.000
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kasus Anak Korban Kekerasan dan Anak Bermasalah Hukum Ditindaklanjuti (%)	100	2.500.000.000	143	551.546.250	86	324.999.400	0	0	37	62.935.000	0	5.720.000	0	7.722.000	37	76.377.000	23,5	76.377.000	180	627.923.250	25,12	627.923.250
Koordinasi Pengembangan dan perlindungan Anak	Jlh Kasus DiTindak Lanjuti/Didampingi	280	550.000.000	95	260.913.650	50	49.999.700	0	0	30	2.048.000	0	0	0	0	30	2.048.000	4,10	2.048.000	125	262.961.650	47,81	262.961.650
Pembinaan Forum Anak Kabupaten Karimun	Jlh Kecamatan Dibina	48	600.000.000	24	121.096.000	12	74.999.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	121.096.000	20,18	121.096.000
Pengembangan Kota Layak Anak	Jlh Kecamatan Yang Difasilitasi	48	750.000.000	24	169.536.600	12	75.000.000	0	0	4	32.245.500	0	5.720.000	0	0	4	37.965.500	50,62	37.965.500	28	207.502.100	27,67	207.502.100
Fasilitasi Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Kota Layak Anak	Jlh Kecamatan Yang Difasilitasi	48	600.000.000	0	0	12	125.000.000	0	0	3	28.641.500	0	0	0	7.722.000	3	36.363.500	29,09	36.363.500	3	36.363.500	6,06	36.363.500
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, HIV-AIDS bagi Perempuan dan Anak	Kasus Anak Korban Kekerasan dan Anak Bermasalah Hukum Ditindaklanjuti (%)	100	1.200.000.000	341	806.462.400	150	1.100.000.000	0	0	25	19.877.500	0	0	0	1.500.000	25	21.377.500	1,94	21.377.500	366	827.839.900	68,99	827.839.900
Peningkatan Perlindungan perempuan Terhadap Bahaya Narkoba, PMS, HIV/AIDS	Jlh Peserta Kegiatan	400	600.000.000	165	421.193.500	75	100.000.000	0	0	25	19.877.500	0	0	0	1.500.000	25	21.377.500	21,38	21.377.500	190	442.571.000	73,76	442.571.000
Peningkatan Perlindungan Anak dan Remaja Terhadap Bahaya Narkoba, PMS, HIV/AIDS	Jlh Anak/Remaja Peserta Kegiatan	400	600.000.000	176	385.268.900	75	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	385.268.900	64,21	385.268.900

2	Terkendali Laju Perumbuhan Penduduk	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi (CPR) (%)	80,9	17.308.000.000	1081	3.804.035.100	328	2.215.483.900	0	0	0	20.866.300	38	153.754.000	93	310.991.200	131	485.611.500	21,9	485.611.500	1212	4.289.646.600	24,78	4.289.646.600		
		Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun	Jlh Org Yang Dibina/Dilayani	2455	5.530.000.000	491	1.570.823.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	1.570.823.000	28,41	1.570.823.000	
		Operasional Penggerakan Di Kampung KB (DAK Non Fisik)	Jlh Kampung KB/Kec	52	4.848.000.000	24	1.197.684.500	24	1.222.466.000	0	0	0	0	9.390.000	1	27.265.000	2	98.790.000	3	135.445.000	11,08	135.445.000	27	1.333.129.500	27,50	1.333.129.500	
		Operasional Pembinaan Program Oleh Kader (DAK Non Fisik)	Jlh Kader Dibina	568	2.612.000.000	284	133.950.000	142	426.000.000	0	0	0	0	36	105.000.000	18	58.000.000	54	163.000.000	38,26	163.000.000	338	296.950.000	11,37	296.950.000		
		Operasional Balai Penyuluhan KB Kecamatan (DAK Non Fisik)	Jlh Unit BP KB	10	1.368.000.000	4	122.484.700	2	217.638.000	0	0	0	0	5.850.000	1	19.089.000	1	65.734.000	2	90.673.000	41,66	90.673.000	6	213.157.700	15,58	213.157.700	
		Operasional Distribusi Alokasi (DAK Non Fisik)	Jlh Fasilitas Kesehatan	75	352.000.000	30	6.428.000	15	35.700.000	0	0	0	0	680.500	0	0	4	1.232.500	4	1.913.000	5,36	1.913.000	34	8.341.000	2,37	8.341.000	
		Manajemen Pengelolaan BOKB (DAK Non Fisik)	Jlh Paket Kegiatan	32	1.048.000.000	13	470.105.600	5	163.680.000	0	0	0	0	4.945.800	0	2.400.000	2	28.144.000	2	35.489.800	21,68	35.489.800	15	505.595.400	48,24	505.595.400	
		Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mabunggal Keluarga Berencana (KB) Kesehatan	Jlh Orang Yang Dilayani	600	1.350.000.000	235	302.559.300	100	75.000.000	0	0	0	0	0	0	66	59.090.700	66	59.090.700	78,79	59.090.700	301	361.650.000	26,79	361.650.000		
		Sosialisasi dan Edukasi Program KKBPK	Jlh Orang Yang Dilatih	120	200.000.000	0	0	40	74.999.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Program Dukungan Sarana Pelayanan KB	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi (CPR) (%)	80,9	6.190.000.000	10	1.939.226.024	5	1.015.920.000	0	0	0	0	8.488.700	0	0	3	97.865.700	3	106.354.400	10,5	106.354.400	13	2.045.580.424	33,05	2.045.580.424	
		Pengadaan Sarana Pelayanan KB	Jlh Paket Kegiatan	30	5.940.000.000	7	1.802.990.012	4	990.920.000	0	0	0	0	0	0	2	82.000.000	2	82.000.000	8,28	82.000.000	9	1.884.990.012	31,73	1.884.990.012		
		Pendamping Administrasi	Jlh Paket Kegiatan	5	250.000.000	3	136.236.012	1	25.000.000	0	0	0	0	8.488.700	0	0	1	15.865.700	1	24.354.400	97,42	24.354.400	4	160.590.412	64,24	160.590.412	
		Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	0,54	300.000.000	0	0	83	175.000.000	0	0	0	0	34.521.000	22	7.350.000	0	17.863.500	22	59.734.500	34,1	59.734.500	22	59.734.500	19,91	59.734.500	
		Peningkatan Kesertaan KB	Jumlah peserta	250	300.000.000	0	0	83	175.000.000	0	0	0	0	34.521.000	22	7.350.000	0	17.863.500	22	59.734.500	34,13	59.734.500	22	59.734.500	19,91	59.734.500	
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	0,54	560.000.000	110	83.544.500	100	75.000.000	0	0	50	0	24.486.000	25	12.100.000	0	9.680.000	75	46.266.000	61,7	46.266.000	185	129.810.500	23,18	129.810.500	
Pemilihan PIK-R & Duta Genre TK. Kec/Kab./Prov	Jlh Peserta Pemilihan	500	560.000.000	110	83.544.500	100	75.000.000	0	0	50	0	24.486.000	25	12.100.000	0	9.680.000	75	46.266.000	61,69	46.266.000	185	129.810.500	23,18	129.810.500			

		Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi (CPR) (%)	80,9	300.000.000	65	49.950.000	1000	74.999.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	65	49.950.000	16,65	49.950.000		
		Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL dan PPKS	Jumlah peserta	300	300.000.000	65	49.950.000	1000	74.999.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	49.950.000	16,65	49.950.000		
3		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Realisasi Pemanfaatan Anggaran Belanja OPD (%)	90	13.100.000.000	48	11.546.492.688	12	643.612.500	3	88.315.000	3	193.166.200	3	98.150.000	3	256.238.800	12	635.870.000	98,8	635.870.000	60	12.182.363.688	93,00	12.182.363.688
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran	Jlh bulan operasional/ Kegiatan	60	13.100.000.000	48	11.546.492.688	12	643.612.500	3	88.315.000	3	193.166.200	3	98.150.000	3	256.238.800	12	635.870.000	98,80	635.870.000	60	12.182.362.688	93,00	12.182.362.688
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Realisasi dan Pemanfaatan Anggaran Belanja OPD (%)	90	150.000.000	4	77.687.700	1	29.999.960	0	0	1	29.253.000	0	0	0	500.000	1	29.753.000	99,2	29.753.000	5	107.440.700	71,63	107.440.700
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	Jlh Dokumen LAKIP Yang Disusun	5	150.000.000	4	77.687.700	1	29.999.960	0	0	1	29.253.000	0	0	500.000	1	29.753.000	99,18	29.753.000	5	107.440.700	71,63	107.440.700	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai Evaluasi LKIP OPD	81=A	750.000.000	3	476.959.250	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3	476.959.250	63,59	476.959.250		
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Kegiatan	5	750.000.000	3	476.959.250	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	476.959.250	63,59	476.959.250		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Pelanggaran Disiplin Aparatur	0,1	250.000.000	3	147.705.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	3	147.705.000	59,08	147.705.000		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Kegiatan	5	250.000.000	3	147.705.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	147.705.000	59,08	147.705.000		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Evaluasi LKIP OPD	81=A	300.000.000	5	145.056.000	2	64.999.640	0	0	0	15.466.000	0	0	2	48.939.100	2	64.405.100	99,9	64.405.100	7	209.461.100	69,82	209.461.100
		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jlh Dokumen Renja Yang Disusun	5	150.000.000	4	80.100.000	1	24.999.920	0	0	0	0	0	1	24.495.100	1	24.495.100	97,98	24.495.100	5	104.595.100	69,73	104.595.100	
		Penyusunan Perjanjian Kinerja Semua Eselon dan Pengukuran Indikator Kinerja OPD	Jlh Dokumen Kinerja Yang Disusun	4	150.000.000	1	64.956.000	1	39.999.720	0	0	0	15.466.000	0	0	1	24.444.000	1	39.910.000	99,78	39.910.000	2	104.866.000	69,91	104.866.000

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilakukan oleh OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Karimun Tahun 2020, program dan kegiatan dapat dilaksanakan 98,26%, dan anggaran dapat direalisasikan sebesar 44,48%, yang terdiri dari 15 Program dan 35 kegiatan belanja langsung.

Walaupun demikian masih terdapat program dan kegiatan yang harus terus ditingkatkan dan mendapat perhatian terutama kegiatan yang sangat mendongkrak capaian indikator sasaran tahun berikutnya. Hal ini untuk pencapaian Indikator yang sejalan dengan RPJMD dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021, mengingat situasi dan kondisi tahun 2020 berkaitan dengan defisit anggaran daerah memberi dampak pada pencapaian indikator, dengan demikian maka rencana kerja tahun 2020 berisikan kajian terhadap pelayanan OPD DPPKBP3A berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam kegiatan.

Jenis indikator yang di kaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diukur, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas hasil analisisnya disajikan pada bagian ini.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karimun 2016-2021. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun. Berikut tabel mengenai capaian kinerja dan pelayanan OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun tahun 2020 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020

MISI 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Dan Kompetitif Serta
Menjawab Kebutuhan Daerah. (TERDEPAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN)

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas Guna Menekan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial															
Sasaran 1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender															
1	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,79 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	91,48	91,7	92,25	92,52	92,79	91,16	91,18	91,35	91,48	90,91	92,79	Realisasi gagal, dibawah Target 1.61 point
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						64,0	64,15		56,47	57,03	64,17	64,17	65,0	Realisasi Berhasil, diatas Target 0.17 point
Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas dan Keberdayaan Gender Dalam Pembangunan															
1	Penanganan Kasus Perlindungan Hak dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	Realisasi Berhasil, Sesuai Target 100%
2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	45,4 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	45	45,1	45,2	45,3	45,4	44,98	51,16	55,03	37,65	56,65	45,4	Realisasi Berhasil, diatas Target 0.17 %
3	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Ditindaklanjuti	100 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi Berhasil, Sesuai Target 100%
4	Kasus Anak Korban Kekerasan dan Anak Bermasalah Hukum (ABH) yang Ditindaklanjuti	100 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	100	100	100	100	100	93	100	100	100	100	100	Realisasi Berhasil, Sesuai Target 100%
Sasaran 3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Yang Responsif Gender															
1	Kecamatan Yang Memiliki Taman Bermain Layak Anak	100 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	5	20	30	60	100	0	0	8,33	33,3	33,3	100	Realisasi gagal, dibawah Target 26.7 %
2	Fasilitas Sarana Pendidikan dalam Sekolah Ramah Anak (SRA) Menuju Kecamatan Layak Anak	100 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	10	25	50	70	100	0	8,33	41,67	58,3	58,3	100	Realisasi gagal, dibawah Target 11.7 %

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas Guna Menekan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial															
Sasaran 4. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk															
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,54 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	0,84	0,85	0,71	0,7	0,54	1,13	1.051	1,02	1,06	1,11	0,54	Realisasi gagal, melebihi Target 0.41 %
2	Kepala Keluarga (KK) Terdata dalam Pendataan Keluarga	100 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	70	75	80	90	100	60	68	71,07	100	0	100	Realisasi gagal,Tidak Terlaksana
3	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Thn)	2,4 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	6,14	4,25	3,5	3	2,4	6,72	6,76	22,08	7,62	7,62	2,4	Realisasi gagal, melebihi Target 4.62 %
4	Laporan Data Base SIGA oleh Petugas Lini Lapangan (PLKB) Kecamatan	100 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	100	100	100	100	100	80	95	100	100	100	100	Realisasi Berhasil, Sesuai Target 100%
Sasaran 5. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mensukseskan Program Keluarga Berencana (KB)															
1	Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	80,9 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	78,2	78,5	80	80,5	80,9	78	83,47	73,12	80,64	82,68	80,9	Realisasi Berhasil, diatas Target 2.18 %
2	Cakupan peserta KB aktif yang menggunakan MKJP	25,5 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	24	24,25	24,56	25	25,5	1,2	1,4	14,41	10,9	12,19	25,5	Realisasi gagal, dibawah Target 12.81 %
3	Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet need)	10 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	10,4	10,3	10	10	10	10,29	8,9	11,22	10,16	8,71	10	Realisasi Berhasil, dibawah Target 1.29 %

**MISI 7 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, Bersih, Dan Melayani
(TERDEPAN DALAM PELAYANAN BIROKRASI)**

NO	Indikator *)	SPM/Standar Nasional/Daerah		Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis Terhadap Target
		Satuan Target	Sumber Target	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas Guna Menekan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial															
Sasaran 4. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk															
1	Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD	81= A	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	66= B	70= B	72= BB	75= BB	81= A	75= BB	75= BB	52,45 = CC	62,04 = B	70,35 = BB	81= A	Realisasi Berhasil, Sesuai Target 100%
2	Tingkat Pelanggaran Disiplin Aparatur	0,0 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	0,4	0,4	0,3	0,2	0,0	0,1	0	0	0	0,0	0,0	Realisasi Berhasil, dibawah Target 0.2 %
3	Realisasi dan Pemanfaatan Anggaran Belanja OPD	90 %	Renstra DPPKBPPPA 2016 - 2021	80	83	86	88	90	92	97,43	75,82	57,78	44,48	90	Realisasi gagal, dibawah Target 43.52 %

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah masyarakat) di masa yang akan datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Penyebaran COVID-19 pada awal tahun 2020 lalu yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dari segi ekonomi, pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang luas maka hal ini akan menimbulkan pengangguran di mana-mana dan kemiskinan pun tercipta (meningkatnya keluarga Pra Sejahtera). Ini tentu saja akan mempengaruhi proses kehidupan di bidang lainnya. Kebutuhan ekonomi yang tidak memadai juga dapat berpengaruh pada tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang. Bagaimana mau memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, jika untuk kebutuhan hidup sehari-haripun mereka susah mendapatkannya. Tak hanya berhenti di situ saja, tingkat kriminalitas pun akan meningkat. Orang dalam kondisi lapar akan berbuat apa saja yang penting kebutuhannya bisa terpenuhi. Ujung dari pertumbuhan penduduk yang tinggi itu adalah menimbulkan kerusakan lingkungan dengan segala dampak yang menyertainya seperti menurunnya kualitas pemukiman dan lahan yang ditelantarkan. Intinya, pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan rakyat, sampai menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menghambat perkembangan negara Indonesia.

Hal ini tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan pertumbuhan penduduk yang tinggi ini sebagai suatu hal yang positif atau negatif bagi suatu daerah, bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Jika ingin menekan pesatnya pertumbuhan penduduk, maka kita dapat melakukan hal-hal, yang di antaranya: menggalakkan program Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan massal, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran, menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi, dan sebagainya.

Secara garis besar isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Penyebaran COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.
2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan politik.
3. Masih adanya pola pikir di masyarakat yang kurang tepat mengenai Keluarga Berencana.
4. Berkembangnya sektor jasa di Kabupaten Karimun berpotensi mendorong eksploitasi anak, baik anak yang dipekerjakan maupun human trafficking.
5. Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak berwenang.
6. Penanganan perempuan korban tindak kekerasan yang belum optimal.
7. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin) dan faktor kesiapan SDM.
8. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mengukung pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak.
9. Peningkatan kapasitas SDM OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun, khususnya dalam hal-hal teknis terkait tupoksi.
10. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi SDM lokal.
11. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi peningkatan kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak.
12. Melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak.
13. Meningkatkan upaya pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan akta kelahiran dan penyediaan ruang publik yang aman untuk bermain.
14. Membentuk wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kabupaten Karimun tahun 2016-2021 telah disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

RENJA DPPKBP3A TAHUN 2022

Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 serta melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas-bawah serta bawah-atas (top down-bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya.

Untuk itulah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) selama Tahun 2016-2021 terus berusaha menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat berdasarkan hasil musrembang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten diperoleh beberapa kegiatan program yang memerlukan dukungan anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir. Berdasarkan analisis semua program dan kegiatan yang diusulkan dari hasil musrembang sudah tersedia pada anggaran yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hasil Musrembang Kecamatan tahun 2021 ada beberapa usulan kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang di lingkungan OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun yang diajukan untuk dilaksanakan pada tahun 2022, antara lain :

a. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan ini mengusulkan adanya pembinaan organisasi perempuan untuk meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan melalui sosialisasi kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam bentuk program Gerakan Sayang Ibu (GSI) serta pengembangan dan Pembinaan Desa Prima.

b. Bidang Perlindungan Anak

Pada Bidang Perlindungan Anak ini mengusulkan melalui Musrembang pengadaan sarana permainan anak-anak dalam rangka mewujudkan Kecamatan Layak Anak dan Kecamatan Ramah Anak seperti Kolam Balon, seluncuran anak, istana balon, permainan edukatif Kit. Pembentukan UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten Ramah Anak (KRA), serta pengembangan Forum Anak.

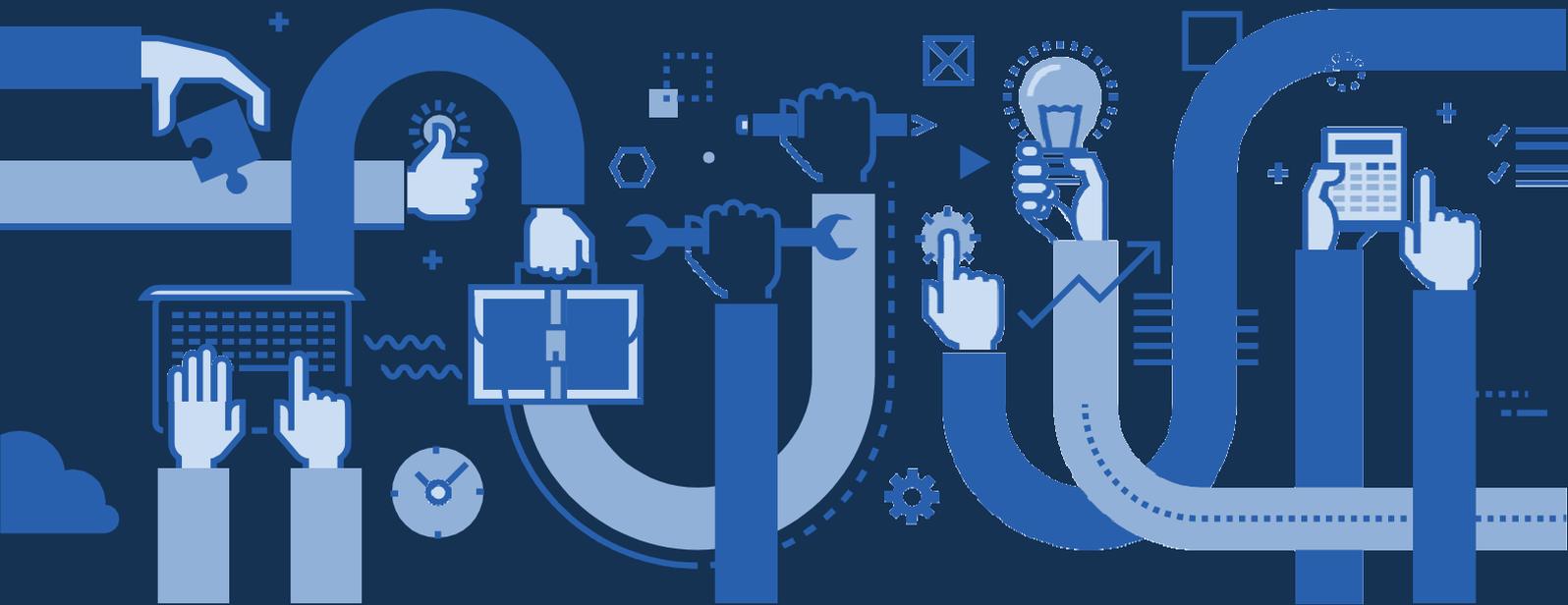
c. Bidang Keluarga Berencana

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Pemerintah Daerah melalui Bidang KB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun melakukan pelayanan kontrasepsi gratis dalam pengaturan kelahiran diharapkan adanya ketersediaan kontrasepsi yang berkesinambungan.

Melalui pembinaan Keluarga Berencana dan pembinaan kapasitas kompetensi pengelola program KB di kecamatan-kecamatan sehingga data laporan melalui aplikasi dapat diperoleh lebih akurat. Kegiatan yang mendukung lainnya pelatihan ketrampilan pelayanan kontrasepsi dan sistem pelaporan dan pencatatan program KB bagi petugas pelayanan KB di sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas), klinik-klinik dan Rumah Sakit.

d. Bidang Keluarga Sejahtera

Dalam hal peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga penyertaan modal usaha pada kelompok-kelompok usaha yang ada di desa-desa, yaitu kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) melalui Pembinaan ketahanan keluarga dalam bentuk kelompok Tribina (BKB, BKL, BKR). Pembinaan tersebut juga diharapkan menjadi tanggungjawab bersama baik dengan lembaga negara BKKBN maupun Dinas Propinsi. Untuk membantu pendewasaan usia perkawinan sebagai suatu wadah yang menangani remaja dalam bentuk kelompok Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) di desa, karang taruna, sekolah, pesantren, perguruan tinggi maupun pada kelompok Generasi Berencana (Genre) yang ada di wilayah Kabupaten Karimun.



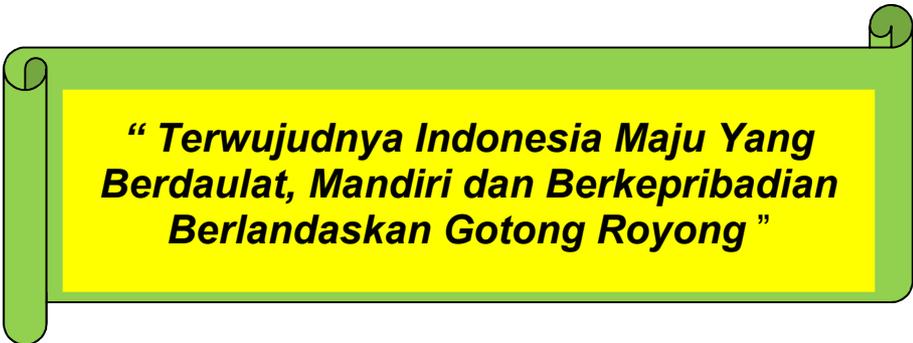
**RENJA DPPKBP3A
TAHUN 2022**

BAB : III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Program Nasional

Dalam Rencana Strategis Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneq PPPA) serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2020-2024 tidak mempunyai visi dan misi kementerian dan lembaga, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu :



“ Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”

Upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ini adalah melalui 9 misi pembangunan (Nawa Cita II) yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sembilan misi ini merupakan pengembangan, percepatan dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia).



Selanjutnya diuraikan sebagai informasi 9 agenda prioritas yang dikenal dengan “NAWA CITA I” periode sebelumnya ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Prioritas pembangunan untuk mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh resiko, antara lain :

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Undang investasi seluas luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan.
4. Reformasi Birokrasi.
5. APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Renstra Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PPPA)

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu :

“ Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekuil, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”

Untuk mewujudkan Visi Pemerintahan Kabinet Kerja tersebut, Kemeneg PPPA melalui kewenangan sebagai salah satu dari Kabinet Kerja yang memberikan kontribusi strategis untuk membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya). Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
2. Peningkatan perlindungan anak;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu :

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. Proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. Prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. TPAK Perempuan;
7. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan Presiden, yaitu :

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Penurunan pekerja anak; dan
5. Pencegahan perkawinan anak.

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Sasaran Strategis Kemen PPPA tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan;
2. Meningkatkan pemenuhan hak anak;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan PPPA;
4. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPO;
5. Meningkatkan perlindungan khusus anak;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA

Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Presiden dan Wakil Presiden RI telah menyampaikan Visi dan Misi Pemerintah Periode tahun 2020-2024 dalam rangka “meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia maju” yang menjadi acuan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan harus dijadikan acuan oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L periode tahun 2020- 2024.

Terkait dengan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), secara umum BKKBN berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Janji Presiden dalam hal :

1. Kependudukan;
2. Keluarga Berencana (KB)
3. Pembangunan Keluarga:



Dalam mendukung Visi, Misi dan Janji Presiden RI 2020-2024 sebagaimana tertera diatas, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut :

Visi BKKBN Tahun 2020-2024 adalah : **“Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang” guna mendukung tercapainya “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”**

Visi tersebut mengandung pengertian :

1. Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2,29 pada tahun 2020 sampai dengan 2,19 pada tahun 2024.
2. Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KBKR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan serta untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
5. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
6. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Secara umum Renstra 2020-2024 BKKBN memiliki tujuan untuk :

1. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.

- 
2. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR), dapat mencapai 2,29 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,19 pada 2024.
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), 48,70 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 50,00 persen pada tahun 2024.
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need. 8,88 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,36 persen pada 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 13 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 9 per-1.000 kelahiran pada 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK), sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP). perempuan usia 25-49 tahun menjadi 22,9 tahun pada 2020 dan menjadi 23,2 tahun pada 2024.

Visi Misi dan 5 (lima) arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada PN “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, dan PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan penjabaran arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagai berikut :

1. Memperkuat pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka mencapai, mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi.
2. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran (kelompok masyarakat).
3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.
4. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Banggakanencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

1. Tujuan Strategi OPD

Secara praktis, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (*mission accomplished*). Oleh karena itu, tujuan dibentuk dari kata kerja (verba) dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan-nya dan diturunkan untuk setiap tujuan.

Tujuan strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Tahun 2022 hasil revisi rewiu RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2020 sebagai berikut :

- 1.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas Guna Menekan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial.
- 1.2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Melalui Pemantapan Reformasi Birokrasi.

2. Sasaran Strategi OPD

Sebagai penjabaran dari tujuan yang ditetapkan, sasaran strategis DPPKBP3A yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- 2.1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender.
- 2.2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk.
- 2.3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas aparatur OPD.

3. Tugas dan Fungsi OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, lalu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.

DPPKBP3A Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar serta melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

DPPKBP3A Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

- a. Merumus kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Uraian tugas DPPKBP3A Kabupaten Karimun, sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku;
- b. Menyiapkan rencana kerja dan penetapan kebijakan teknis pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian program/kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Melaksanakan kegiatan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Melaksanakan tugas lain di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditugaskan oleh Bupati.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPPKBP3A Kabupaten Karimun termasuk kategori Tipe B, serta struktur organisasi dan tatakerja terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - a. Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendetayagunaan PLKB
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
 - a. Seksi Pengembangan, Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan, Peningkatan kualitas hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
6. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
 - a. Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak, Data dan Informasi

3.3. Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun 2022 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipatif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan perencanaan diawali dari tingkat Musrenbang Desa dan Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum OPD hingga Musrenbang tingkat Kabupaten serta tingkat Provinsi dan rencana kerja OPD yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karimun 2021 – 2026 serta sinkronisasi dari berbagai usulan dengan memperhatikan agenda pembangunan di pusat, Propinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun dimana pembangunan sarana & prasarana pelayanan publik perlu menjadi prioritas.

Rencana pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh DPPKBP3A Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan antara lain :
 - 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 1.2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
 - 1.3. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
2. Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan antara lain :

- 
- 2.1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
 - 2.2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
 3. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan antara lain :
 - 3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 3.2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

II. Program Perlindungan Perempuan

1. Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan diantaranya :
 - 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan diantaranya :
 - 2.1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan diantaranya :
 - 3.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 3.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 3.3. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 3.4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

III. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan antara lain :
 - 1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 1.2. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 1.3. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. SubKegiatan antara lain:
 - 2.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan antara lain :
 - 3.1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

IV. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

1. Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan diantaranya :
 - 1.1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 1.2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.

V. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan antara lain :
 - 1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 
- 1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 2. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan antara lain :
 - 2.1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

VI. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan diantaranya :
 - 1.1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan diantaranya :
 - 2.1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2.3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2.4. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan diantaranya :
 - 3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- 
- 3.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. Program Pengendalian Penduduk

1. Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk. Sub Kegiatan diantaranya :
 - 1.1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
 - 1.2. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 1.3. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan.
 - 1.4. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal.
 - 1.5. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota.
 - 1.6. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal.
 - 1.7. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga.
 - 1.8. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.
2. Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan antara lain :
 - 2.1. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan.
 - 2.2. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
 - 2.3. Pemetaan Kependudukan.
 - 2.4. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan.
 - 2.5. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.
 - 2.6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
 - 2.7. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga.

- 
- 2.8. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.
 - 2.9. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK.

II. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal. Sub Kegiatan diantaranya :
 - 1.1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - 1.2. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK.
 - 1.3. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - 1.4. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
 - 1.5. Pengendalian Program KKBPK
2. Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). Sub Kegiatan antara lain :
 - 2.1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.
 - 2.2. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
 - 2.3. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
3. Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan terdiri dari :
 - 3.1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - 3.2. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - 3.3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
 - 3.4. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - 3.5. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - 3.6. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 - 3.7. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.

- 
4. Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB. Sub Kegiatan diantaranya :
 - 4.1. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB.
 - 4.2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.
 - 4.3. Pembinaan Terpadu Kampung KB.

III. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

2.1.1.1. Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Sub Kegiatan terdiri dari :

- 1.1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).
- 1.2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- 1.3. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- 1.4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- 1.5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- 1.6. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- 1.7. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga).
- 1.8. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK.

2.1.1.2. Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Sub Kegiatan diantaranya :

- 2.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

2.2. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan diantaranya :
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 1.5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan terdiri dari :
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Sub Kegiatan antara lain :
 - 3.1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - 3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Sub Kegiatan terdiri dari :
 - 4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 4.2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - 4.3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - 4.4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 4.5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub Kegiatan ialah :
 - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 5.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- 
- 5.6. Penyediaan Bahan/Material.
 - 5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 5.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sub Kegiatan terdiri dari :
 - 6.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 6.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 6.3. Pengadaan Mebel.
 - 6.4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 6.5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 6.6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 6.7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub Kegiatan antara lain :
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub Kegiatan terdiri dari :
 - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 8.2. Pemeliharaan Mebel.
 - 8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BAB : IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan Dan Saran

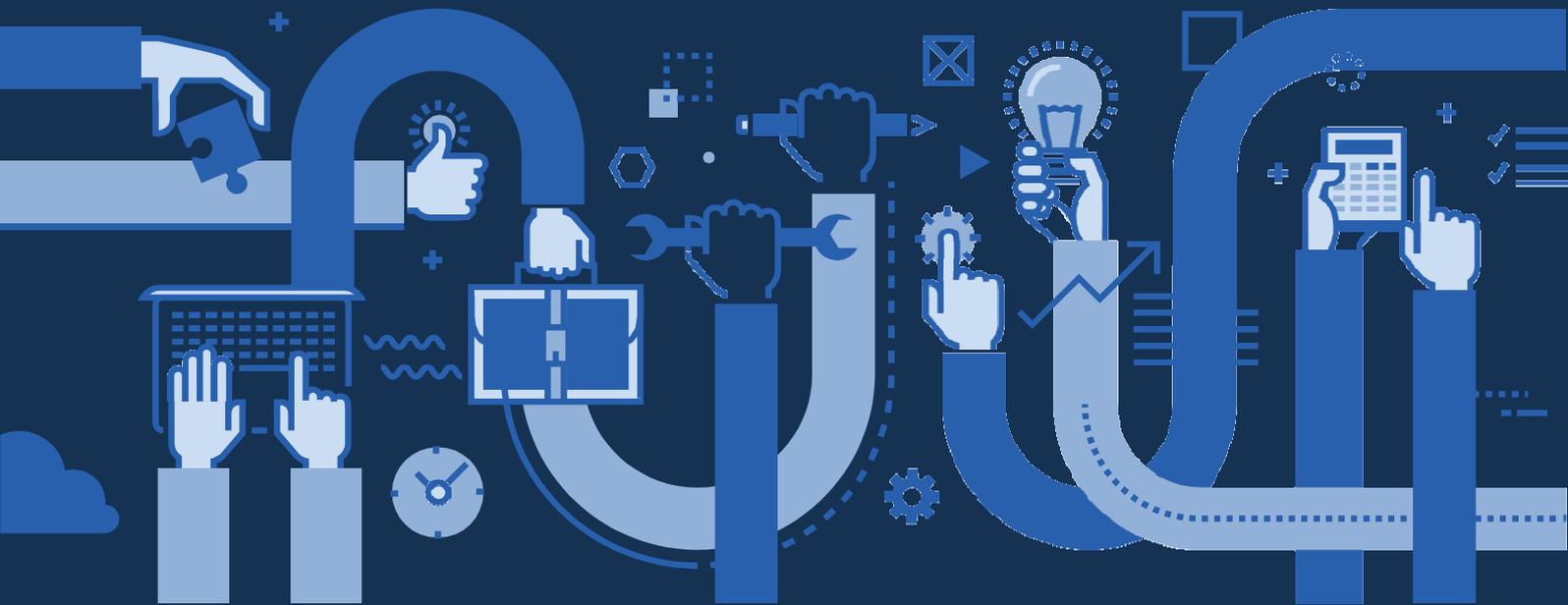
Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Karimun tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan.

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman pada kaidah-kaidah yang sudah ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi Kepulauan Riau, visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Karimun, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA/DPA Dinas PPKBP3A Kabupaten Karimun.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya akan melengkapi dan menyusun dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD DPPKBP3A Kabupaten Karimun, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.



**RENJA DPPKBP3A
TAHUN 2022**

MATRIK USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020

OPD : 2.08.2.14.0.00.08.0000 : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

MISI Ke 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				
							Tahun 2022								
							Kinerja	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		3 Urusan	9.100.000.000							
				2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		6 Program	2.865.000.000							
Terwujudnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Peran Perempuan dan Anak Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	56,72	550.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022				
				2.08.02.201.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG pada Lembaga Pemerintahan	32 Lembaga	200.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022				
				2.08.02.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kegiatan Hari Ibu	40 Orang	50.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des				
				2.08.02.201.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	50.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des				
				2.08.02.201.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi	45 Orang	100.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des				
				2.08.02.202.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Upaya Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan	1 Laporan	150.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022				
				2.08.02.202.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi	30 Orang	100.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des				
				2.08.02.202.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	50.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des				
				2.08.02.203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1 Laporan	200.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022				
				2.08.02.203.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	30 Lembaga	100.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des				
				2.08.02.203.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Laporan	100.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des				
								2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Perlindungan Hak dan Tindak Kekerasan pada	100%	500.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
								2.08.03.201	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di Dampingi	1 Laporan	100.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022

Perempuan yang men dapatkan penanganan	2.08.03.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang di lakukan Koordinasi dan Pembinaan	12 Kecamatan	50.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
	2.08.03.201.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	50.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
	2.08.03.202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Layanan Rujukan Perempuan Korban Kekerasan (P2TP2A)	1 Laporan	150.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
	2.08.03.202.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kasus yang ditindaklanjuti	25 Laporan	100.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
	2.08.03.202.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang dikoordinir	1 Unit	50.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
	2.08.03.203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	1 Laporan	250.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
	2.08.03.203.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	50.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
	2.08.03.203.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kegiatan/pembinaan	30 Orang	50.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
	2.08.03.203.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kegiatan	30 Orang	50.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
	2.08.03.203.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang di lakukan Koordinasi dan	12 Kecamatan	100.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
	2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prestasi Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Tingkat Madya	465.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
	2.08.04.201	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak Anak	1 Laporan	200.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
	2.08.04.201.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	50.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
	2.08.04.201.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Laporan	50.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
	2.08.04.201.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang di lakukan Koordinasi/Pembinaan	12 Kecamatan	100.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
	2.08.04.202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penguatan dan Pengembangan Peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak Anak	1 Dokumen	200.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
	2.08.04.202.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	12 Lembaga	50.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
	2.08.04.202.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang dilatih	60 Orang	100.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
	2.08.04.202.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang di lakukan Koordinasi dan Pembinaan	12 Kecamatan	50.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des

2.08.04.203	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyedia Layanan bagi Keluarga dan Hak Anak (UPT P2TP2A)	1 Unit	65.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.08.04.203.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan	1 Laporan	65.000.000	Bidang PP	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prestasi Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak	Strata Pratama	100.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.08.05.201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Dokumen Data Gender dan Anak yang tersedia	1 Dokumen	100.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.08.05.201.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data yang disusun	2 Laporan	50.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.05.201.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Data Gender dan Anak yang Tersedia	2 Sistem Informasi	50.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Fasilitas Taman Bermain Layak Anak di Kecamatan Yang Responsif Gender	41,67%	650.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.08.06.201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan	1 Dokumen	200.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.08.06.201.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan yang disusun	1 Laporan	100.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.06.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang di lakukan Koordinasi/Pembinaan	12 Kecamatan	100.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.06.202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3 Lembaga	450.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.08.06.202.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Laporan	100.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.06.202.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Tingkat Kecamatan Yang dilakukan Pembinaan	12 Forum Anak	100.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.06.202.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Bermain Layak Anak di Kecamatan yang dibangun	5 Kecamatan	150.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.06.202.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang di lakukan Koordinasi dan Pembinaan	12 Kecamatan	100.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kasus Anak Korban Kekerasan dan Anak Bermasalah Hukum (ABH) yang Ditindaklanjuti	100%	600.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.08.07.201	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tim/Satgas Terlibat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	30 Instansi/Lembaga	150.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022

2.08.07.201.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	50.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.07.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang di lakukan Koordinasi	12 Kecamatan	100.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.07.202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Penyedia Layanan bagi Anak Korban Kekerasan (P2TP2A)	1 Unit	300.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.08.07.202.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kegiatan	75 Orang	100.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.07.202.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Anak yang dilakukan Pendampingan Hukum	25 Kasus	100.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.07.202.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Laporan	50.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.07.202.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang di lakukan Koordinasi	12 Kecamatan	50.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.07.203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	1 Dokumen	150.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.08.07.203.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Layanan bagi Anak Korban Kekerasan (P2TP2A)	1 Unit	50.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.07.203.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kegiatan	50 Orang	50.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.08.07.203.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang di lakukan Koordinasi	12 Kecamatan	50.000.000	Bidang PA	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		3 Program	3.135.000.000			
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rasio Akseptor KB	88,67%	550.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.14.02.201	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.14.02.201.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah OPD/Lembaga Peserta Kegiatan Koordinasi	0	0	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.201.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK yang disusun	1 Dokumen	100.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.201.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Kecamatan yang di lakukan Survey IPM	12 Kecamatan	50.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.201.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Laporan	50.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des

Terwujudnya Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Terkendalinya Penduduk dan Keluarga Berencana	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR)
-----------------------------------	---------------------------------	---	--

2.14.02.201.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan	0	0	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.201.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Kegiatan	0	0	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.201.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Kecamatan yang Melakukan Sarasehan	12 Kecamatan	50.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.201.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Kecamatan Peserta Rapat	0	0	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian	1 Dokumen	300.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.14.02.202.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Berkas Data Kependudukan	1 Berkas	50.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.202.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil yang disusun	1 Dokumen Profil	50.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.202.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Kecamatan Pelaksana Pemetaan	0	-	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.202.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	50.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.202.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Kampung KB yang Membentuk Rumah Data	2 Desa /Kelurahan	50.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.202.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pembinaan	12 Kecamatan	50.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.202.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Berkas Data yang Tersedia	0	-	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.202.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Data Pelayanan KB	1 Laporan	50.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.02.202.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pembinaan	0	-	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	12,36%	2.100.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.14.03.201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB	1 Dokumen	300.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.14.03.201.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Media KIE Tersedia	1 Laporan	50.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.201.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Media KIE Tersedia	12 Kecamatan	100.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.201.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Laporan	50.000.000	Bidang KB, KS	1 Laporan	Jan-Des
2.14.03.201.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Kegiatan	3 Unit BPKB	150.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.201.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Laporan	50.000.000	Bidang KB, KS	1 Laporan	Jan-Des
2.14.03.202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB Kecamatan yang Dibina	12 Orang	200.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022

2.14.03.202.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Kecamatan Melakukan Pembinaan IMP	12 Kecamatan	50.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.202.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Kecamatan Mendapat Bantuan Sarana Pendukung	12 Kecamatan	50.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.202.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Bulan Operasional Kader Kecamatan (Honor)	12 Bulan	100.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Kesehatan Sasaran Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	16 Unit Sarkes	1.350.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.14.03.203.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Fasilitas Kesehatan (Faskes) mendapat Alat dan Obat Kontrasepsi	16 Laporan	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.203.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Peserta Diklat Manajemen KB	30 Orang	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.203.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kecamatan Sasaran Pelayanan KB MKJP	12 Kecamatan	200.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.203.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Paket Kegiatan Penyediaan	6 Paket	800.000.000	Bidang Dalduk	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.203.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan (Faskes) mendapat Pembinaan	16 Unit	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.203.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Peserta Diklat Pelayanan KB	30 Orang	100.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.203.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Kecamatan Sasaran Pelayanan KB Bergerak	12 Kecamatan	100.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi	1 Dokumen	250.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.14.03.204.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Laporan	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.204.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Dibina Program KKBPK	24 Desa /Kelurahan	150.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.03.204.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Dibina	24 Desa /Kelurahan	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet need)	8,67%	485.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.14.04.201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	385.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.14.04.201.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Dibentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5 Desa/ Kelurahan	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
2.14.04.201.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Paket Kegiatan Penyediaan	6 Paket	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des

				2.14.04.201.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta Orientasi/Diklat	25 Orang	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
				2.14.04.201.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Bulan Bantuan Operasional Kegiatan	12 Bulan	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
				2.14.04.201.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Bulan Bantuan Operasional Kegiatan	12 Bulan	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
				2.14.04.201.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Laporan	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
				2.14.04.201.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Kegiatan	1 Laporan	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
				2.14.04.201.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	35.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
				2.14.04.202	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	100.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
				2.14.04.202.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta Kegiatan	30 Orang	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
				2.14.04.202.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Peserta Kegiatan	30 Orang	50.000.000	Bidang KB, KS	12 Kecamatan	Jan-Des
				2.08	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1 Program	3.100.000.000			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (GOOD GOVERNANCE)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	2.08.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80%	3.100.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
				2.08.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1 Laporan	250.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
				2.08.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
				2.08.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	60 Dokumen	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
				2.08.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	25 Dokumen	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
				2.08.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
				2.08.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
				2.08.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1.200.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
				2.08.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	35 Orang	1.000.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
				2.08.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai	8 Orang	100.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
2.08.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai	4 Orang	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des				

	2.08.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
	2.08.01.203.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
Tingkat Pelanggaran Disiplin Aparatur	2.08.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	250.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
	2.08.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	55 Stel	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data kepegawaian yang diolah	1 Dokumen DUK	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.205.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monev	1 Laporan	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	35 Orang	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	55 Orang	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum	1 Laporan	400.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
	2.08.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen yang disediakan	12 Jenis	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60 Jenis	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Jenis	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15 Jenis	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	15 Dokumen	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.206.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan /Material yang Disediakan	11 Jenis	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	50 SPPD	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi Data	1 Unit	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	350.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
	2.08.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda 4 yang diadakan	1 Unit	100.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang diadakan	0	0	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5 Unit	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	2 Unit	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
	2.08.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor (RUKO) yang Disewa	1 Unit	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des

2.08.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarpras Gedung Kantor Lainnya	1 Unit	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
2.08.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarpras Pendukung lainnya	1 Unit	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
2.08.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	1 Laporan	300.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.08.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang dibeli	5000 Lembar	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
2.08.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan rekening yang dibayarkan	24 Bukti Bayar	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
2.08.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
2.08.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	35 Orang	150.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
2.08.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	250.000.000	DPPKBP3A Karimun	Kabupaten Karimun	TA 2022
2.08.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala	1 Unit	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
2.08.01.209.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	2 Unit	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
2.08.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara secara rutin/berkala	3 Unit	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
2.08.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung/Bangunan Lainnya	1 Unit	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des
2.08.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Bangunan Kantor lainnya	1 Unit	50.000.000	Sekretariat	DPPKBP3A	Jan-Des

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN



Dra. ROSMAWATI, MM.Pub.
NIP. 19650814 199403 2 014

